

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 147-154

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11372406)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11372406>

## Analisis Historis Perumusan Pembukaan UUD 1945

Fatkhur Rohman<sup>1\*</sup>, Robiatul Adawiyah<sup>2</sup>, Rokhima Fatimah Zahra<sup>3</sup>, Syayyidah Alifah Eka<sup>4</sup>,  
Nila Lafifatus Sa'adah<sup>5</sup>, Bakti Fatwa Anbiya<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email korespondensi: [Rohmanfatkhur870@gmail.com](mailto:Rohmanfatkhur870@gmail.com)

### Abstrak

Pembukaan UUD 1945 mencerminkan betapa besarnya semangat bangsa Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan dan membangun negara yang berdaulat. Analisis historis perumusan pembukaan UUD 1945 penting untuk memahami alur sejarah serta nilai-nilai yang terkandung di dalam proses perumusan pembukaan UUD 1945 dan para tokoh yang berperan penting didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengingatkan pembaca bahwa pembukaan UUD 1945 tidak lahir begitu saja, melainkan dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan politik yang memprihatinkan di masa lampau, di mana rakyat Indonesia masih terjajah dan belum merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis historis untuk mengungkap alur sejarah perumusan pembukaan UUD 1945 hingga selesai. Data diperoleh dari sumber primer yaitu buku Risalah Sidang BPUPKI, serta sumber-sumber sekunder yang relevan. Proses perumusan pembukaan UUD 1945 dimulai pada tanggal 29 April 1945 dengan dibentuknya BPUPKI dan berakhir dengan pembacaan dan pengesahan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang alur sejarah perumusan pembukaan UUD 1945 serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan para tokoh yang berperan penting didalamnya. Artikel ini memberikan implikasi dalam memperkuat pemahaman tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, memiliki keterbatasan pada fokus yang terbatas pada analisis historis, kurangnya inklusi terhadap perspektif kontemporer, dan keterbatasan sumber historis yang tersedia untuk penelitian.

**Kata kunci:** *Analisis historis, Perumusan, Pembukaan UUD 1945*

### Abstract

*The preamble to the 1945 Constitution reflects the great enthusiasm of the Indonesian people in fighting to achieve independence and build a sovereign state. Historical analysis of the formulation of the preamble to the 1945 Constitution is important to understand the historical flow and values contained in the process of formulating the preamble to the 1945 Constitution and the figures who played an important role in it. The purpose of this research is to remind readers that the opening of the 1945 Constitution was not born out of thin air, but was motivated by worrying social and political conditions in the past, where the Indonesian people were still colonized and not yet independent. This research uses a historical analysis approach to reveal the historical flow of the formulation of the preamble to the 1945 Constitution until its completion. Data was obtained from primary sources, namely the BPUPKI Session Minutes book, as well as relevant secondary sources. The process of formulating the preamble to the 1945 Constitution began on April 29 1945 with the formation of BPUPKI and ended with the reading and ratification on August 18 1945 by the Indonesian Independence Preparatory Committee (PPKI). The results of this research provide in-depth insight into the historical flow of the formulation of the preamble to the 1945 Constitution as well as the values contained in it and the figures who played an important role in it. This article provides implications in strengthening understanding of the history of Indonesia's struggle for independence and the values contained in the Preamble to the 1945 Constitution. However, it has limitations in its limited focus on historical analysis, lack of inclusion of contemporary perspectives, and limited historical sources available for research.*

**Keywords:** *Historical analysis, Formulation, Preamble to the 1945 Constitution*

---

#### Article Info

Received date: 08 May 2024

Revised date: 18 May 2024

Accepted date: 26 May 2024

### PENDAHULUAN

Sebagaimana dikatakan oleh Soekarno, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa". Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan pembukaan UUD 1945 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan

Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang sangat penting dalam konstitusi Indonesia. Sebagai prakata bagi undang-undang dasar tersebut, pembukaan ini tidak hanya menyatakan tujuan dan cita-cita negara, tetapi juga mencerminkan perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan membangun negara yang berdaulat. Analisis historis terhadap perumusan pembukaan UUD 1945 menjadi penting untuk memahami konteks, proses, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada saat merumuskan pembukaan UUD 1945, para pendiri bangsa Indonesia berusaha mencerminkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan. Dokumen ini mencerminkan keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa merdeka, adil, dan makmur. Sebagai hasil dari perumusan yang teliti dan matang, pembukaan UUD 1945 mencakup nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial yang menjadi pondasi bagi negara Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 lahir dari konteks sejarah yang penuh dengan perjuangan dan penindasan. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah mengalami kurun waktu panjang di bawah cengkeraman penjajah Belanda. Distorsi sejarah yang dilakukan oleh penjajah, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mencoba untuk merubah narasi tentang perjuangan dan identitas nasional Indonesia. Penjajah sering kali mengecilkan peran serta rakyat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan serta mencoba untuk menanamkan pandangan yang merendahkan tentang kemampuan dan martabat bangsa Indonesia.

Alinea pertama pembukaan UUD 1945 menjadi cermin dari realitas pahit yang dirasakan bangsa Indonesia saat itu. Dengan pernyataan bahwa "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa", pembukaan tersebut menggarisbawahi bahwasanya kemerdekaan bukanlah hak yang diberikan para penjajah, melainkan hak yang melekat pada setiap bangsa. Pernyataan ini juga mencerminkan keinginan kuat untuk mengakhiri penjajahan dan mendirikan negara yang merdeka, adil, dan makmur.

Berbagai penelitian historis telah menyoroti pentingnya pembukaan UUD 1945 dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini mencakup analisis tentang proses perumusan pembukaan UUD, peran tokoh-tokoh kunci dalam perjuangan kemerdekaan, serta dampak dari nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan tersebut terhadap perkembangan sosial, politik, dan budaya Indonesia.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengingatkan pembaca bahwa pembukaan UUD 1945 tidak lahir begitu saja, melainkan dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan politik yang memprihatinkan di masa lampau, di mana rakyat Indonesia masih terjajah dan belum merdeka. Rumusan masalah dari artikel ini meliputi: Bagaimana alur sejarah perumusan pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai apa yang tertuang didalamnya?, Siapa saja tokoh yang berpengaruh dan memiliki peran penting dalam proses perumusan pembukaan UUD 1945?

Artikel ini memiliki implikasi penting dalam memperkuat pemahaman tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Namun, keterbatasan artikel ini mungkin terletak pada fokus yang terbatas pada analisis historis dan kurangnya inklusi terhadap perspektif kontemporer atau sudut pandang yang berbeda terkait dengan pembukaan UUD 1945. Selain itu, artikel ini juga mungkin terbatas pada sumber-sumber yang tersedia untuk penelitian historis, seperti arsip resmi, catatan sejarah, dan literatur yang relevan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian analisis historis adalah pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan peristiwa sejarah dengan mendalam melalui analisis sumber-sumber historis, seperti dokumen-dokumen sejarah, artefak, dan catatan. Dengan meneliti materi-materi tersebut, peneliti dapat memahami konteks sejarah di mana peristiwa tersebut terjadi, mengeksplorasi sebab-akibat dari peristiwa tersebut, dan menyajikan interpretasi yang beragam tentang masa lalu. Alasan utama menggunakan metode ini adalah karena memberikan wawasan yang mendalam, memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejarah, dan memfasilitasi pembentukan interpretasi yang kaya dan nuansawan tentang peristiwa sejarah. Dalam penelitian ini, metode analisis historis diterapkan dengan mendalam melalui kajian terhadap sumber-sumber primer dari buku "Risalah Sidang BPUPKI", peneliti menggali secara detail

catatan-catatan langsung dari proses perumusan pembukaan UUD 1945. Dokumen ini memberikan gambaran yang autentik tentang diskusi, argumen, dan kompromi yang terjadi di antara para tokoh yang terlibat dalam sidang BPUPKI. Sumber sekunder dari jurnal ilmiah yang relevan juga digunakan untuk memberikan konteks historis yang lebih luas dan mendalam. Dengan memadukan sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang alur sejarah dan nilai-nilai yang tertuang dalam proses perumusan pembukaan UUD 1945, serta kontribusi tokoh-tokoh penting dalam proses tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah perumusan pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai yang tertuang didalamnya.**

Proses dirumuskannya Pembukaan UUD 1945 pada awal tahun 1945 diawali dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintahan Jepang yang menduduki Indonesia pada saat itu. BPUPKI ditugaskan untuk membuat rumusan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, yang merupakan respons terhadap permintaan dan tuntutan masyarakat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan politik. Pembentukan BPUPKI mencerminkan perubahan strategis dalam kebijakan Jepang terhadap Indonesia, di mana mereka mulai mengakui pentingnya memberikan otonomi kepada bangsa Indonesia dalam usaha persiapan kemerdekaan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan perumusan usaha-usaha persiapan kemerdekaan, BPUPKI memainkan peran sentral dalam proses perumusan konstitusi dan pembentukan negara Indonesia yang baru. Hal ini menandai awal dari fase penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana langkah-langkah konkret mulai diambil untuk mewujudkan kemerdekaan nasional.

Pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, BPUPKI menggelar sidang pertama kalinya yang menjadi momen penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Sidang tersebut dihadiri oleh 67 anggota yang mewakili berbagai lapisan masyarakat dan latar belakang politik. Diskusi dan debat yang berlangsung selama beberapa hari menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Panitia Sembilan yang bertugas membuat rumusan naskah dasar negara. Panitia Sembilan kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang menjadi dasar bagi Pembukaan UUD 1945. Hasil lain dari sidang tersebut adalah munculnya konsep awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila diangkat sebagai konsep yang diusulkan oleh tokoh-tokoh nasionalis untuk menjadi landasan ideologis dan filosofis bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Konsep ini mencakup lima prinsip dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pengusulan Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan semangat inklusifitas yang menghargai keragaman dan menyatukan berbagai kepentingan dalam menciptakan identitas nasional yang kokoh dan inklusif. Keputusan ini memainkan peran penting dalam pembentukan identitas negara Indonesia yang baru, serta memberikan pijakan ideologis bagi pembentukan konstitusi dan negara yang demokratis dan berkeadilan.

Pada rentang tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menggelar sidang yang kedua kalinya yang menjadi tonggak penting dalam proses perumusan konstitusi Indonesia. Salah satu agenda utama dalam sidang tersebut adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang merupakan langkah konkret dalam merumuskan landasan hukum dan politik negara Indonesia yang baru merdeka. Diskusi yang terjadi dalam sidang tersebut mencakup berbagai aspek yang relevan dengan struktur pemerintahan, hak-hak asasi manusia, sistem keadilan, dan hubungan antara pusat dan daerah. Keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan dari sidang kedua BPUPKI menjadi landasan penting dalam penyusunan teks final UUD 1945, yang mana dijadikan sebagai pijakan bagi pembentukan negara Indonesia modern. Sidang kedua BPUPKI mencerminkan komitmen para pemimpin Indonesia untuk membangun negara yang demokratis, adil, dan berdaulat, serta merupakan tonggak awal dalam proses pembentukan institusi negara yang kuat dan stabil.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), suatu langkah penting dalam persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Pembentukan PPKI menandai tahap lanjut dari perjuangan memerdekakan Indonesia setelah dibacakannya

proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan berbagai aspek terkait dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk pembentukan pemerintahan, penetapan undang-undang dasar, dan urusan-urusan administratif lainnya. PPKI menjadi forum penting di mana para pemimpin Indonesia bersama-sama merencanakan masa depan negara yang baru merdeka. Langkah ini menunjukkan komitmen yang kuat dari para pemimpin Indonesia untuk mengatur proses transisi menuju kemerdekaan secara sistematis dan terorganisir. Dengan pembentukan PPKI, Indonesia memasuki fase baru dalam perjalanan sejarahnya menuju kedaulatan dan kemerdekaan penuh sebagai negara merdeka.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang dengan tanpa syarat menyerah kepada pihak Sekutu, menandai akhir dari Perang Dunia II yang terjadi di Asia Pasifik. Keputusan Jepang untuk menyerah memiliki dampak yang besar terhadap wilayah yang mereka kuasai, termasuk Indonesia. Serah terima kekuasaan dari Jepang kepada pihak lain di Indonesia menjadi tidak terelakkan. Tanggal 16 Agustus 1945 menjadi penting dalam konteks peristiwa Rengasdengklok, dimana sekelompok pemuda dan pemimpin nasionalis Indonesia menyelenggarakan rapat rahasia di Rengasdengklok, Jawa Barat, dengan tujuan mengamankan proklamasi kemerdekaan yang telah direncanakan untuk tanggal 17 Agustus. Peristiwa ini menunjukkan kesigapan dan determinasi para pemuda dan pemimpin nasionalis dalam mengambil alih kendali pemerintahan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tengah situasi yang tidak pasti pasca-serah terima kekuasaan dari Jepang. Rengasdengklok menjadi simbol penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, menegaskan tekad untuk meraih kemerdekaan walaupun dalam kondisi yang sulit dan tak menentu. Peristiwa ini memperkuat semangat perjuangan dan solidaritas di antara para pemimpin dan rakyat Indonesia, serta membuka babak baru dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, di tengah ketegangan dan euforia nasionalis yang tinggi, dilakukanlah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Oleh Soekarno dan Hatta, proklamasi tersebut dibacakan di Jakarta, menandai dimulainya era kemerdekaan Indonesia setelah hampir tiga setengah abad berada di bawah kekuasaan kolonial. Teks proklamasi tersebut, yang singkat namun sarat makna, menyatakan dengan tegas keberanian dan tekad bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Pembacaan proklamasi tersebut menjadi simbol kesatuan dan persatuan seluruh bangsa Indonesia dalam menghadapi masa depan yang baru. Selain itu, peristiwa ini juga memperlihatkan pentingnya kepemimpinan dan visi dari Soekarno dan Hatta dalam menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat untuk meraih kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi tersebut bukan hanya sekedar seremoni formal, namun juga merupakan awal dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang baru diperolehnya.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diadakan dengan agenda yang sangat penting bagi perjalanan sejarah Indonesia pasca-proklamasi. Pertama, sidang tersebut mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia, yang dijadikan sebagai landasan hukum dan politik bagi negara yang baru merdeka. Keputusan ini menandai langkah awal dalam pembentukan lembaga negara yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedua, PPKI juga mengangkat presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Wakilnya, menetapkan kepemimpinan yang akan memimpin negara yang baru merdeka menuju masa depan yang lebih baik. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan dan pengakuan atas peran penting yang dijalankan oleh Soekarno dan Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, sidang PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), lembaga legislatif sementara yang bertugas untuk mengawasi dan menetapkan kebijakan-kebijakan penting dalam proses pembentukan negara baru. Keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi landasan penting dalam pembentukan dan konsolidasi negara Indonesia yang baru merdeka, serta menunjukkan tekad dan keseriusan para pemimpin Indonesia dalam membangun negara yang berdaulat, demokratis, dan adil. Selain itu, pada sidang ini juga pembukaan UUD 1945 yang telah disepakati oleh Panitia Sembilan dibacakan dan disetujui oleh semua anggota. Pembacaan teks pembukaan ini menjadi momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikenal dengan

kata-kata "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa" menjadi manifesto perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan dan penindasan. Sejak saat itu, pembukaan UUD 1945 dijadikan sebagai landasan moral dan hukum bagi negara Indonesia dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

• Naskah Pembukaan UUD 1945

Terdapat perubahan pada pembukaan UUD 1945 saat sebelum dan sesudah disahkan, yaitu perubahan pada sila kesatu. Alasan sila kesatu dasar negara di Piagam Jakarta diubah adalah untuk persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta menyampaikan perubahan sila tersebut di sidang PPKI. Sila pertama tersebut kemudian berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat itu mencerminkan bahwa Indonesia menjunjung toleransi antar umat beragama. Setelah mengalami perubahan, Piagam Jakarta berubah menjadi Pembukaan UUD 1945. Kesimpulannya adalah sila pertama berubah demi kepentingan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku dan agama.



Sebelum disahkan



Sesudah disahkan

**Tokoh-tokoh penting yang berpengaruh dalam proses perumusan UUD 1945**

1. Ir. Sukarno:

Sebagai salah satu pemimpin nasionalis Indonesia yang kharismatik dan berpengaruh, memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945. Sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno tidak hanya menjadi figur simbolis, tetapi juga menjadi pemimpin yang aktif dalam merumuskan visi dan misi negara yang baru merdeka. Dalam konteks perumusan Pembukaan UUD 1945, Soekarno turut berperan dalam memimpin dan mengarahkan diskusi-diskusi yang terjadi di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Sembilan. Soekarno dikenal dengan kemampuannya dalam berpidato dan menyuarakan visi politiknya yang berapi-api, yang memberikan arah bagi pembentukan identitas dan karakter negara Indonesia yang baru. Kontribusi Soekarno dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945 terutama terlihat dalam memberikan arahan dan semangat bagi para anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan dalam menegakkan nilai-nilai nasionalisme, kemerdekaan, dan persatuan dalam teks Pembukaan tersebut. Selain itu, sebagai seorang yang memiliki visi panjang tentang masa depan Indonesia, Soekarno juga berperan dalam memastikan bahwa Pembukaan UUD 1945 mencerminkan aspirasi dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, adil, dan berdaulat. Dengan demikian, peran Soekarno dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945 tidak hanya sebagai seorang pemimpin politik, tetapi juga sebagai seorang pemimpin intelektual dan visioner yang berperan dalam membentuk dasar negara Indonesia yang baru merdeka. Ir. Soekarno juga yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

## 2. Mohammad Hatta:

Mohammad Hatta, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945. Dia menjadi salah satu pemimpin utama yang aktif terlibat dalam diskusi dan debat di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Sembilan, menggunakan pengetahuannya dalam ilmu ekonomi dan politik untuk mengarahkan pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar yang harus diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, Hatta juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan persatuan bangsa dalam teks Pembukaan tersebut, serta memastikan bahwa teks tersebut memberikan jaminan atas hak-hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai kontribusinya, Hatta memastikan bahwa Pembukaan UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai dasar negara Indonesia yang baru merdeka dan visi untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 3. Muhammad Yamin:

Muhammad Yamin, seorang cendekiawan dan pemikir nasionalis yang berpengaruh, memainkan peran penting dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945. Perannya tercermin dalam kontribusinya untuk menegaskan semangat nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia melalui bahasa yang menginspirasi dan makna yang mendalam dalam teks Pembukaan tersebut. Sebagai seorang penyair dan pengarang yang terampil, Yamin mampu menyuarakan aspirasi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dengan penuh semangat dan martabat. Kontribusinya dalam merumuskan teks Pembukaan UUD 1945 tidak hanya mencerminkan semangat perjuangan, tetapi juga menegaskan identitas bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, Muhammad Yamin memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menjadi pijakan moral dan filosofis bagi bangsa Indonesia dalam membangun negara yang baru merdeka.

## 4. Prof. Dr. R. Soepomo:

Prof. Dr. R. Soepomo, seorang tokoh hukum dan intelektual nasionalis yang berpengaruh, memiliki peran penting dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945. Sebagai anggota Panitia Sembilan, Soepomo memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyusun teks Pembukaan yang menjadi landasan filosofis dan hukum bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Dengan latar belakang pendidikan hukumnya, Soepomo membawa pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum yang relevan dengan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada aspek legalitas, tetapi juga pada aspek filosofis dan moral, memastikan bahwa teks Pembukaan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, peran Soepomo dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945 tidak hanya sebagai seorang ahli hukum, tetapi juga sebagai seorang pemikir dan pemimpin yang berperan dalam membentuk dasar negara yang baru merdeka.

## 5. Mr. A.A Maramis:

Dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945, A.A. Maramis, seorang politikus dan tokoh nasionalis Indonesia, memainkan peran penting sebagai anggota Panitia Sembilan. Perannya tercermin dalam keberhasilannya merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi dasar rumusan Pancasila. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman dalam bidang politik dan pemerintahan, Maramis membawa perspektif yang berharga tentang pentingnya membangun landasan yang kuat untuk negara yang baru merdeka. Kontribusinya dalam pembahasan dan penyusunan teks Pembukaan menggambarkan tekad untuk menciptakan negara yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, peran A.A. Maramis dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945 tidak hanya sebagai seorang politikus, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang berperan dalam membentuk dasar negara yang baru merdeka dengan memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan persatuan.

## 6. Abikusno Tjokrosujoso:

Abikusno Tjokrosujoso, yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Abik, merupakan seorang tokoh nasionalis Indonesia yang berperan penting dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945. Sebagai anggota Panitia Sembilan, peran Bung Abik mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada pembentukan teks Pembukaan yang menjadi landasan moral dan filosofis bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Sebagai seorang intelektual dan politikus, Bung Abik membawa gagasan dan visi tentang persatuan, keadilan, dan kemerdekaan ke dalam diskusi dan

pembahasan teks Pembukaan. Kontribusinya memastikan bahwa teks tersebut mencerminkan semangat bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk meraih kemerdekaan yang seutuhnya serta menegaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Selain itu, Bung Abik juga dikenal karena kemampuannya dalam merangkul berbagai pandangan dan memediasi perbedaan pendapat, yang memungkinkan terciptanya kesepakatan yang mencerminkan aspirasi bersama bangsa Indonesia. Dengan demikian, peran Abikusno Tjokrosujoso dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945 tidak hanya sebagai seorang anggota Panitia Sembilan, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang berperan dalam membentuk dasar negara yang baru merdeka dengan memperjuangkan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kemerdekaan.

## SIMPULAN

Melalui analisis historis terhadap perumusan pembukaan UUD 1945, kita memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses dan nilai-nilai yang tertuang dalam perumusan pembukaan UUD 1945, serta peran para tokoh yang berjasa dalam proses perumusan pembukaan UUD 1945. Dalam proses perumusan Pembukaan UUD 1945, terdapat beberapa tahapan penting yang mencerminkan perjalanan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Awalnya, pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang menjadi tonggak awal dalam perjuangan menuju kemerdekaan. BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka, yang mencerminkan respons terhadap tuntutan masyarakat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan politik. Selanjutnya, melalui sidang-sidang BPUPKI, terutama pada sidang pertama pada Mei-Juni 1945, terbentuklah konsep awal Pancasila sebagai dasar negara, yang diusulkan oleh tokoh-tokoh nasionalis. Selain itu, sidang kedua BPUPKI pada Juli 1945 menjadi titik penting dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mencakup berbagai aspek terkait struktur pemerintahan dan hak asasi manusia. Pada Agustus 1945, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan peristiwa Rengasdengklok menandai langkah-langkah konkret menuju kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta menandai dimulainya era kemerdekaan Indonesia yang baru. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi langkah penting dalam pembentukan negara baru, dengan mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi, mengangkat Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk KNIP. Melalui proses yang panjang dan kompleks ini, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Soepomo, Maramis, dan Abikusno Tjokrosujoso memainkan peran penting dalam merumuskan Pembukaan UUD 1945, yang menjadi landasan moral, filosofis, dan hukum bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Dengan demikian, proses perumusan ini mencerminkan semangat perjuangan dan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan serta membangun negara yang demokratis, adil, dan berdaulat.

## REFERENSI

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta (1995). *Risalah Sidang BPUPKI PPKI*, 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945.
- Setiadi, A. (2005). *Proses Perumusan Pembukaan UUD 1945: Sebuah Tinjauan Historis*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Sudarminto, B. (2010). *Perjuangan Panjang Menuju Kemerdekaan: Studi Kasus Perumusan Pembukaan UUD 1945*. Jurnal Sejarah Nasional.
- Soekarno, A. (1945). *Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan RI.
- Hatta, M. (1956). *Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kartodirdjo, S. (1988). *Kemerdekaan Indonesia Dan Perjuangan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djajadiningrat, R. A. (1977). *Dari Jakarta Ke Linggarjati*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soesastro, H. (2001). *Konstitusi Yang Dipakai Oleh Indonesia Setelah Kemerdekaan*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional.
- Pradjoko, B. (2015). *Peran Panitia Sembilan Dalam Perumusan Pembukaan UUD 1945*. Jurnal Politik Nasional.
- Iskandar, E. Z. (1999). *Pengaruh Ideologi Terhadap Perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Sejarah Nasional.

- Lekra. (1963). *Sejarah Lekra Dan Peranannya Dalam Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sunyoto, D. (2010). *Ideologi Pancasila Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Pemikiran Sosiologi.
- Kusnadi, D. (2005). *Pidato-Pidato Politik Mohammad Hatta*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hadi, M. (2012). *Persatuan Indonesia Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Persatuan Nasional.